

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang selalu dilakukan suatu negara, karena dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan catatan semua hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata (Sastraatmadja, 1986). Hal ini dapat terwujud apabila keadaan nasional selalu stabil dan terjadinya peningkatan yang berkesinambungan antara laju pertumbuhan dan produksi sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi.

Menurut Sastraatmadja (1986), kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan melihat pendapatan perkapita, semakin meningkat pendapatan perkapita maka semakin sejahtera suatu masyarakat pada daerah tersebut. Peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai apabila suatu daerah menjalankan perencanaan yang baik. Namun didalam menjalankan pembangunan ekonomi terdapat faktor khusus dan umum yang menjadi penghambat yaitu ketenagakerjaan dan pengangguran, ini disebabkan karena negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dimana tingkat kelahiran tinggi dan rendahnya tingkat kematian (Sastraatmadja, 1986).

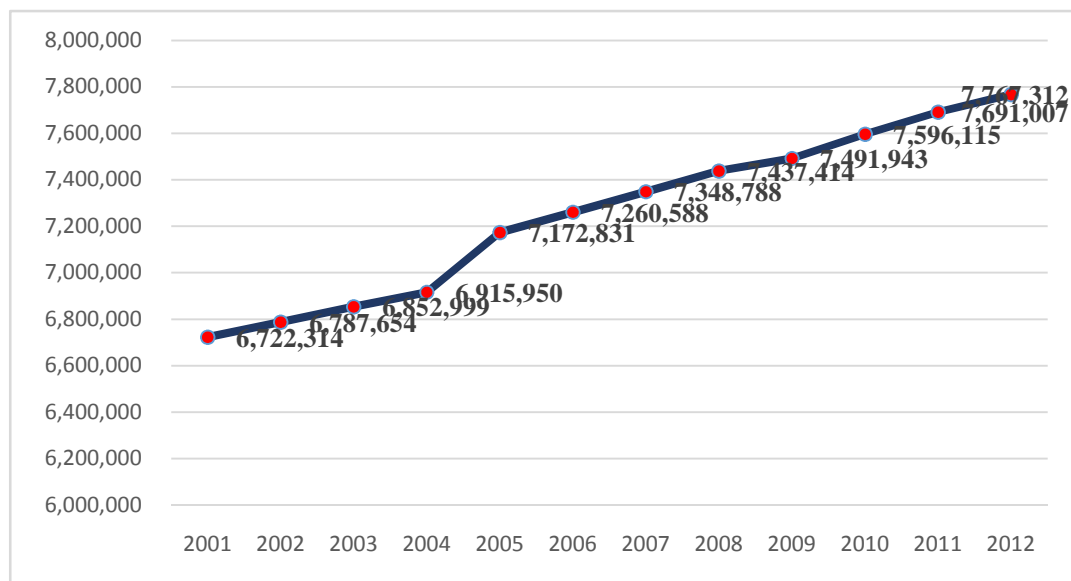
Indonesia adalah negara yang menjalankan rencana ekonomi dengan baik yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Didalam rencana pembangunan tersebut dijelaskan berbagai masalah yang ada di Indonesia.

Didalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2011-2014 (RPJMN 2010-2014) salah satu masalah yang sering muncul disetiap provinsi adalah masalah kriminalitas yang tinggi, faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas pada suatu daerah adalah tingginya angka pengangguran.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1999), pengangguran menyebabkan seseorang bertindak diluar batas akal dan kemampuan seperti mencopet, merampok, dan lainnya. selain itu pengangguran dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan terhalangi dan menyebabkan pengurangan penghasilan pajak, dan ketidakstabilan ekonomi yang mengakibatkan pendapatan perkapita berkurang. Hal ini merugikan banyak pihak, sehingga harus segera diatasi.

Selain itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ditahun 2009 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 231.369 ribu jiwa dengan tingkat pengangguran sebesar 8,1 persen. Jumlah penduduk ini termasuk dalam kategori terbanyak yang dapat menyebabkan tekanan hidup, dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat namun peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk hal ini menyebabkan pengangguran terus menjadi masalah yang berkelanjutan (Sastraatmadja, 1986).

Didalam suatu daerah pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks, karena pengangguran bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun juga menyerang masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang tinggi. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kabupaten dan kota. Pada tahun 1999 Provinsi Lampung memiliki tujuh kabupaten dan satu kota. Pada tahun 2013 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung berkembang menjadi 15 kabupaten dan kota yang terdiri dari 13 kabupaten dan dua kota seiring dengan berjalanya pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung. Pertumbuhan penduduk tersebut dapat kita lihat pada gambar 1 dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001-2012.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung.

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2001-2012 penduduk di Provinsi Lampung semakin meningkat dari 6.722.314 juta/jiwa pada tahun 2001 menjadi 7.767.312 juta/jiwa pada tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang tergolong banyak karena setiap

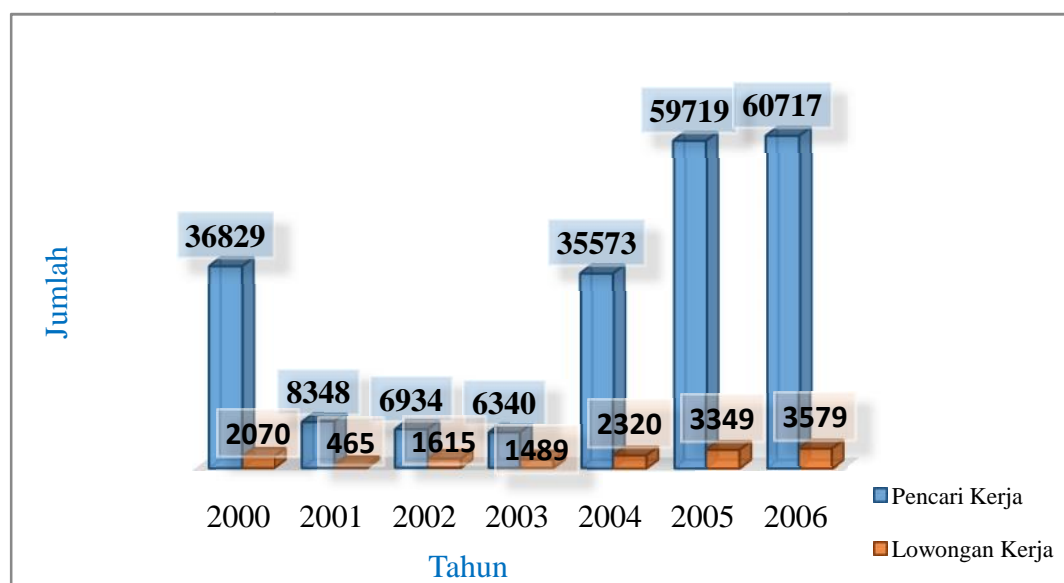
tahunnya jumlah penduduk di Provinsi Lampung selalu bertambah. Selain penduduk yang terbilang banyak, Provinsi Lampung juga memiliki kekayaan alam yang banyak seperti wilayah yang terdiri dari padang rumput, permukiman, sawah, hutan, perairan darat, ladang, perkebunan, dataran tinggi, belukar (Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2010-2014). Provinsi Lampung termasuk provinsi yang sedang berkembang dan dalam menjalankan programnya Provinsi Lampung melakukan perencanaan terlebih dahulu, salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah perencanaan ekonomi.

Perencanaan ekonomi adalah upaya yang dilakukan pemerintah secara sengaja dan hati-hati untuk mengkoordinasikan keputusan ekonomi jangka panjang yang ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Apabila pendapatan provinsi meningkat berarti dapat dikategorikan bahwa provinsi tersebut makmur dan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Setiap masyarakat di Provinsi Lampung memiliki potensi di dalam dirinya yang harus dikaji agar berpotensi lebih besar dan dapat diinvestasikan untuk keberlangsungan hidupnya. Apabila potensi itu dapat dikembangkan maka dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan seperti menjadi tenaga kerja.

Tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 bab I pasal I ayat 2 adalah seseorang yang memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok dengan cara mengerjakan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa. Menurut

Sumarsono (2003), tenaga kerja adalah kesanggupan semua orang untuk bersedia melakukan pekerjaan. Dari tahun ketahun masalah yang sering di hadapi Provinsi Lampung adalah ketenagakerjaan, dimana penduduk Provinsi Lampung setiap tahunnya bertambah sehingga secara otomatis jumlah angkatan kerja meningkat namun wadah untuk menaungi angkatan kerja (lapangan usaha) tidak sesuai dengan peningkatan tersebut yang mengakibatkan pengangguran.



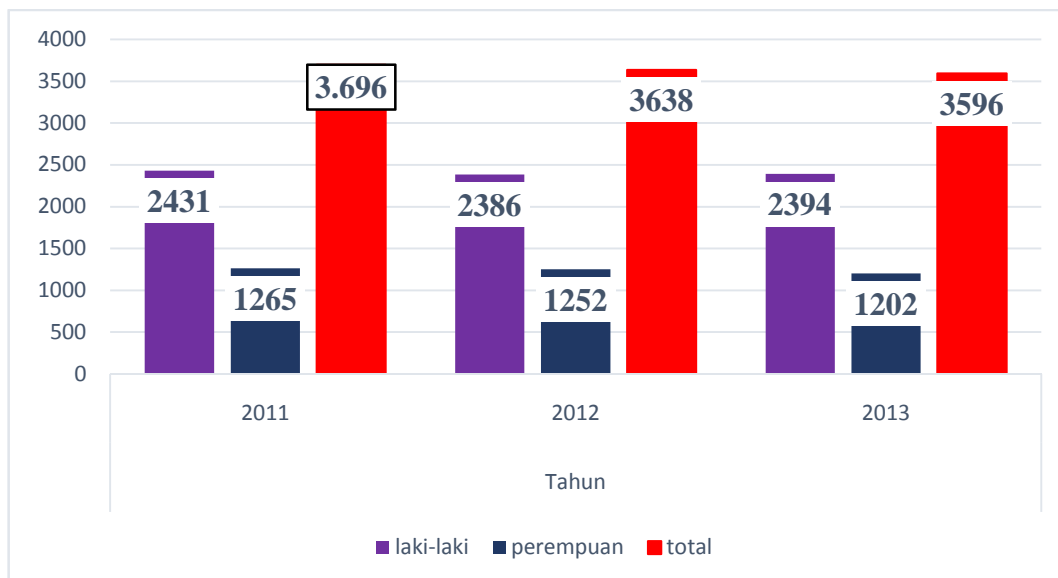
Sumber: BPS tahun 2000-2006.

Gambar 2. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja di Provinsi Lampung.

Berdasarkan Gambar 2 di atas kita dapat membuktikan bahwa di Provinsi Lampung jumlah pencari dan lowongan kerja berfluktuasi. Pada tahun 2000 jumlah pencari kerja berjumlah 36.829 jiwa, sedangkan lowongan kerja yang ada hanya untuk 2.070 jiwa, ini berarti sebanyak 34.759 jiwa terpaksa menganggur. Pada tahun 2001-2003 pencari kerja mengalami penurunan yaitu 8.348 jiwa, 6.934 jiwa, dan 6.340 jiwa, walaupun jumlah pencari kerja mengalami penurunan, tetap saja jumlah lowongan yang ada tidak sebanding.

Pada tahun 2001 lowongan kerja menurun hanya 465 jiwa, meningkat menjadi 1.615 jiwa pada tahun 2002, dan menurun kembali pada tahun 2003 menjadi 1.489 jiwa, keadaan ini tetap saja menimbulkan pengangguran, terlebih lagi pencari kerja dari tahun 2004-2006 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan lowongan kerja, sehingga pada tahun 2006 terdapat 57.138 jiwa yang menganggur. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada tidak sebanding.

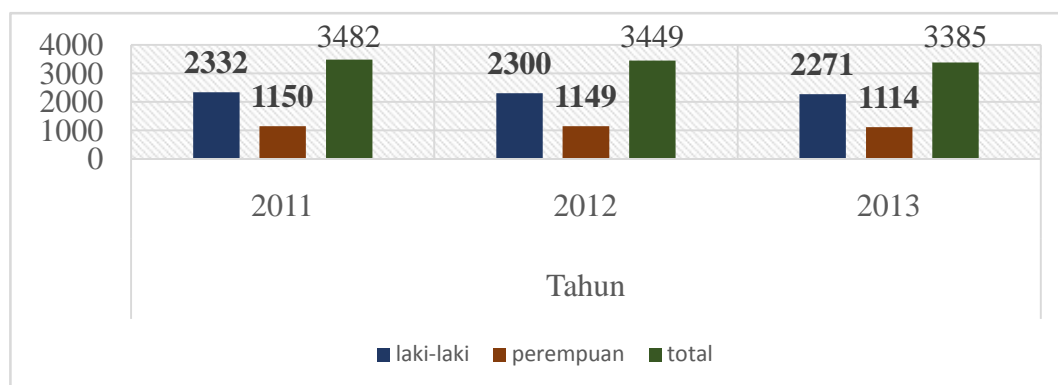
Jumlah pencari kerja termasuk kedalam angkatan kerja dimana penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan (BPS). Apabila dilihat dari segi makro angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah dengan pengangguran (Mankiw, 2003). Menurut Sumarsono (2003), angkatan kerja adalah penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja namun belum berhasil mendapatkannya (pengangguran) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja dan berhasil mendapatkannya. Sedangkan menurut BPS (2014), angkatan kerja adalah penduduk yang menganggur, atau memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan bekerja dengan usia kerja (15 tahun dan lebih). Tiga tahun terakhir ini, Provinsi Lampung mengalami penurunan jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja dari tahun 2011-2013. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



sumber : BPS tahun 2011-2013.

Gambar 3. Penduduk Usia Kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja.

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 3.696 ribu orang pada tahun 2011 menjadi 3.638 ribu orang pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 menjadi 3.596 ribu orang. Hal ini berarti penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja yang ada di Provinsi Lampung semakin berkurang. Hal ini dapat menyebabkan tingkat penduduk usia kerja yang berkerja di Lampung tahun 2011-2013 mengalami penurunan.



Sumber: BPS tahun 2011-2013.

Gambar 4. Penduduk usia kerja yang bekerja di Provinsi Lampung.

Berdasarkan Gambar 4 pada tahun 2011 total orang yang bekerja sebesar 3.482 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.332 jiwa dan perempuan 1.150 jiwa, ini berarti lebih banyak laki-laki yang bekerja dibandingkan perempuan. Tahun 2012 total orang yang bekerja sebesar 3.449 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.300 jiwa dan perempuan 1.149 jiwa, ini berarti orang yang bekerja mengalami penurunan baik pada laki-laki atau perempuan, namun tetap jumlah laki-laki yang bekerja melebihi perempuan.

Pada tahun 2013 Provinsi Lampung kembali mengalami penurunan pada total orang yang bekerja menjadi 3.482 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.332 jiwa dan perempuan 1.150 jiwa. sejak tahun 2011 hingga 2013 total orang yang bekerja di Provinsi Lampung semakin berkurang, hal ini dapat mempengaruhi pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sulit dilepaskan di suatu daerah, karena pengangguran adalah ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada (Sumarsono, 2003).

Menurut Mankiw (2003), pengangguran dapat dibedakan menjadi empat apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya, yaitu : pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran alamiah, dan pengangguran siklis atau konjungtral.

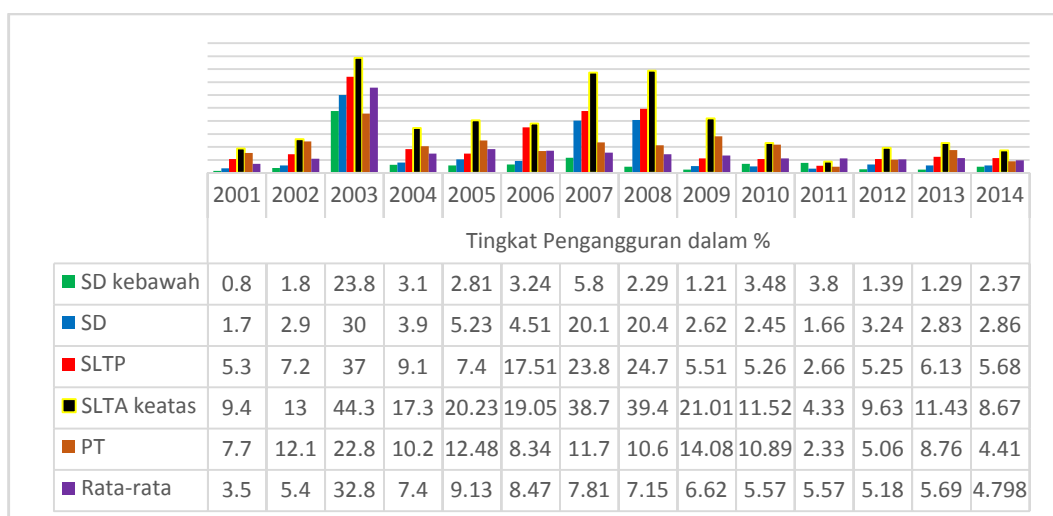
Menurut Azhar Putera Kurniawan, Herniwati Retno Handayani ( 2013), dalam penelitiannya pengangguran terdidik termasuk kedalam pengangguran friksional karena pengangguran terdidik terjadi selama lulusan mengalami masa tunggu.

Menurut BPS (2014), pengangguran terdidik adalah berapa banyak jumlah pencari kerja yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas dibagi dengan angkatan



kerja yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas atau seseorang yang memiliki tingkat pendidikan SMA keatas yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha/yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mampu (bukan karena cacat fisik)/mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum memulai. Menurut Mankiw (2003), pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA keatas. Sedangkan menurut Dinas Ketenagakerjaan pengangguran terdidik adalah seseorang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau pernah mendaftarkan diri untuk bekerja namun belum bekerja dengan jenjang pendidikan SMA ke atas.

Di Provinsi Lampung lapangan kerja yang ada belum cukup untuk menampung jumlah pertumbuhan pengangguran terdidik, sehingga lulusan pendidikan tinggi banyak yang menganggur. Menurut data yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung jumlah pengangguran terbanyak selalu diduduki oleh jenjang SMA keatas ini berarti pengangguran terdidik selalu menjadi masalah.



Sumber : BPS tahun 2001-2014.

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Lampung.

Gambar 5 tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengangguran menurut pendidikan di Provinsi Lampung mengalami penurunan. Hal ini merupakan prestasi yang baik bagi Provinsi Lampung pada khususnya. Namun yang masih menjadi masalah disini adalah tingkat pengangguran terdidik yang tergolong masih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran tidak terdidik. Dapat kita lihat tiap tahunnya pada diagram batang diatas bahwa penyumbang pengangguran terbesar berada pada jenjang SMA keatas atau biasa disebut dengan pengangguran terdidik. SMA keatas dikatakan pengangguran terdidik karena mereka telah berusia di atas 15 tahun yang seharusnya merupakan usia kerja, di usia tersebut pola pikir seseorang telah terbuka untuk masa depan (ingin kemana arah tujuan hidup mereka).

Menurut penjabaran di atas kita ketahui bahwa pengangguran terbanyak di Provinsi Lampung dipegang oleh pengangguran terdidik yaitu lulusan SMA keatas. Hal ini menjadi masalah yang harus dipecahkan karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karena pendidikan disiapkan sebagai investasi masa depan, sehingga diharapkan apabila seseorang mengenyam pendidikan, ia dapat menambah dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan dapat meningkatkan pembangunan terutama dalam bidang kesejahteraan (Mankiw, 2003).

Menurut Sumarsono (2003), kualitas tenaga kerja yang baik dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan merupakan proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian seseorang, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian. Untuk dapat bekerja seseorang dituntut memiliki

pendidikan sebagai modal dasar, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula kemampuannya untuk bekerja. Dengan demikian pendidikan merupakan investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Namun pada kenyataannya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran.

Hal ini menjadi permasalahan di Provinsi Lampung. Untuk mengurangi permasalahan tersebut maka harus diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya seperti mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah.

Mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Mutu sumber daya manusia sangatlah penting, karena mutu sumber daya manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi pengangguran (Sumarsono, 2003).

Menurut Sumarsono (2003), indikator kualitas sumber daya manusia dapat berupa tingkat pendidikan dan jumlah penduduknya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan” oleh Indah Gita Cahyani, Madris, dan Fatmawati (2014), mengatakan bahwa mutu sumber daya manusia diukur dengan tamatan pendidikan diploma ke atas dibagi dengan penduduk umur 20 tahun keatas.

Pengangguran tidak akan tercipta apabila lowongan kerja yang ada sama dengan jumlah orang yang mencari kerja. Dengan adanya lowongan kerja maka seseorang akan gigih untuk mendapatkan pekerjaan itu. Didalam hasil penelitian Purwaka Hari Prihanto (2012), mengatakan bahwa apabila kesempatan kerja sektor formal naik maka pengangguran terdidik akan turun (dengan syarat variabel lain tetap).

Pengangguran terdidik dapat berkurang apabila tingkat upah yang ditawarkan oleh suatu sektor usaha tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Anggun Kembar Sari (2012), bahwa apabila tingkat upah meningkat maka pengangguran terdidik akan turun (dengan syarat variabel lain tetap). Hasil penelitian yang sama diperoleh dari Purwaka Hari Prihanto (2012), yang mengatakan bahwa apabila tingkat upah naik maka pengangguran turun (dengan syarat variabel lain tetap).

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Provinsi Lampung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Lampung. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah mutu sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung?
2. Apakah lowongan kerja formal berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung?

3. Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung?
4. Apakah mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengaruh lowongan kerja formal terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
3. Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
4. Menganalisis pengaruh mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah secara bersama-sama terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Memberikan gambaran bagaimana pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
2. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kesesuaian materi yang diterima di perkuliahan dengan kenyataan.

### **E. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Kualitas tenaga kerja yang baik dapat di cerminkan oleh tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan merupakan proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian seseorang, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian (Sumarsono, 2003). Untuk dapat bekerja seseorang dituntut memiliki pendidikan sebagai modal dasar, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula kemampuannya untuk bekerja. Dengan demikian pendidikan merupakan investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Pada kenyataannya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Hal ini menjadi permasalahan di Provinsi Lampung. Untuk mengurangi permasalahan tersebut maka harus diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya seperti mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah.

Mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Mutu sumber daya manusia sangatlah penting, karena mutu sumber daya manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi pengangguran (Sumarsono,

2003). Indikator kualitas sumber daya manusia dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat pendudukannya.

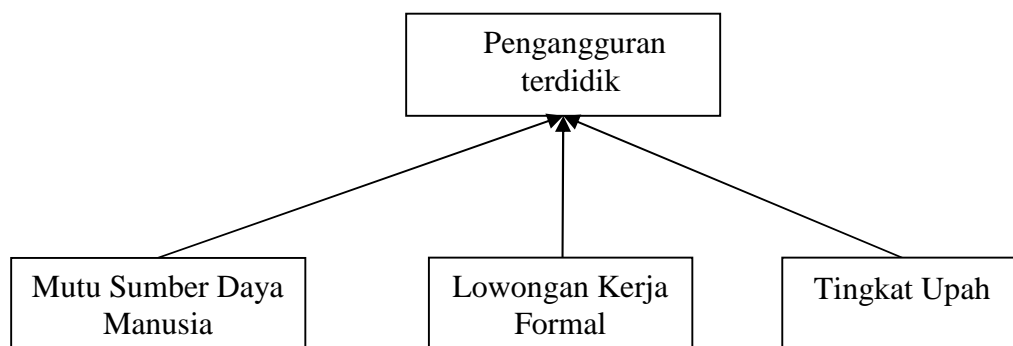
Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan” oleh Indah Gita Cahyani, Madris, dan Fatmawati (2014), mengatakan bahwa mutu sumber daya manusia diukur dengan tamatan pendidikan diploma ke atas dibagi dengan penduduk umur 20 tahun keatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ini berarti semakin tinggi mutu sumber daya manusia maka pengangguran terdidik akan berkurang.

Pengangguran tidak akan tercipta apabila lowongan kerja yang ada sama dengan jumlah orang yang mencari kerja. Dengan adanya lowongan kerja maka seseorang akan gigih untuk mendapatkan pekerjaan itu. Di dalam hasil penelitian Purwaka Hari Prihanto (2012), mengatakan bahwa kesempatan kerja formal berpengaruh negatif dan signifikan, artinya apabila kesempatan kerja sektor formal naik satu persen maka pengangguran terdidik akan turun sebanyak 1,8 persen (dengan syarat variabel lain tetap).

Pengangguran terdidik dapat berkurang apabila tingkat upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Anggun Kembar Sari (2012), bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik, apabila tingkat upah meningkat satu persen maka pengangguran terdidik akan turun sebesar 1,8 persen (dengan syarat variabel lain tetap). Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Purwaka Hari Prihanto (2012),

yang mengatakan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik, apabila tingkat upah naik sebesar satu persen maka pengangguran turun sebesar 0,6 persen (dengan syarat variabel lain tetap).

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini menggunakan variabel mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah yang dapat dilihat pada kerangka pemikiran di bawah ini.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran.

## F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

1. Mutu sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
2. Lowongan kerja formal berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.
3. Tingkat upah berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.



4. Mutu sumber daya manusia, lowongan kerja formal, dan tingkat upah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Lampung.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yakni:

**I. Pendahuluan :** Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, dan Hipotesis penelitian.

**II. Tinjauan Pustaka :** Bab ini berisikan landasan teori yang relevan dengan penelitian ini.

**III. Metodologi Penelitian :** Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari sumber dan jenis data serta metode analisis.

**IV. Hasil dan Pembahasan :** Bab ini berisikan hasil perhitungan dan pembahasan.

**V. Simpulan dan Saran :** Bab ini berisikan simpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**